

STATUS PERNIKAHAN SETELAH TERJADI LI'AN

(Studi Komparatif Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SRI EKAYANTI

10300116081

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Ekayanti
NIM : 10300116081
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 26 Desember 1998
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Galesong Utara Kab. Takalar
Judul : Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian (Studi Komparatif Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam)

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Takalar, 12 Juni 2020

Penulis

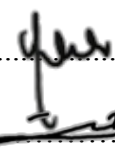





Sri Ekayanti
10300116081

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam)**” yang disusun oleh **Sri Ekayanti, NIM: 10300116095**, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 23 Juli 2020 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Juli 2020 M
3 Dzulhijah 1441 H

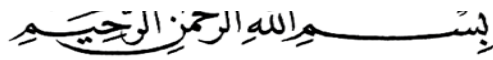
DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag (.....)	
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah HL., M.Pd (.....)	
Munaqisy I	: Dr. Abd. Rahman Sakka, Lc., M.Ag (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Achmad Musyahid, M. Ag (.....)	
Pembimbing I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag (.....)	
Pembimbing II	: Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M. H.I (.....)	

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Nip. 1971122 200012 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain memanjatkan untaian puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan, kekuatan, serta ketabahan hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang senantiasa membawa cahaya dan rahmat bagi sekalian alam.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari kesulitan dan tantangan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D.** selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta para wakil rektor yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dengan baik.
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc, M.Ag.** selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan wakil dekan I, II, dan III yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Bapak **Dr. Ahmad Musyahid Idrus, S.Ag., M.Ag.** ketua program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak **Dr. Abdi Wijaya, S.S.,M.Ag.** sekretaris program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis.
5. Bapak **.Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.** dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing penulis.
6. Bapak **Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., MHI.** dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
8. Yang sangat istimewa dan sangat penulis cintai orang tuaku Mama dan Bapak yang setia dan sabar memberikan motivasi dan doa yang tak henti-hentinya, karena beliaulah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang dan segala bimbingan, baik moral maupun materil.
9. Untuk sahabatku (Mirsa, meylani, Riska, sukma, Riany, Hasri), penulis menemukan arti sebuah persahabatan, penerimaan, pengertian, kesabaran, motivasi, dan kebersamaan yang kalian ciptakan dan telah memberikan kepercayaan tersendiri dalam hidup penulis.
10. Untuk teman kelasku yang paling istimewa (Wana, Hikmah, Ais, Ina, Mur, Suci, Ria,, kiki, ita, Iqra), penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena tanpa bantuan kalian, motivasi kalian penulis tidak bisa sampai di titik ini.
11. Rekan-rekan seangkatan terkhusus PMH C angkatan 2016, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang indah semasa kuliah hingga skripsi ini

dapat diselesaikan. Mari kita raih cita-cita dan masa depan yang diimpikan.

12. Teman-teman KKN terkhusus Posko 10 desa Nepo terima kasih atas doa, semangat dan dorongannya kepada penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini selesai, hanya ucapan terima kasih yang penulis haturkan. Semoga segala bantuan diterima sebagai amal baik disisi Allah SWT. dan memperoleh balasan berlipat ganda. Maka akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, bagi penulis khususnya dan pembaca umum.



Takalar 12 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LIAN.....	15
A. Pengertian Lian.....	15
B. Dasar Hukum Lian.....	17
C. Syarat dan Rukun serta Cara Pelaksanaan Lian.....	19
D. Gambaran Umum Tentang Lian.....	24
E. Lian Termasuk Talak atau Fasakh.....	25
F. Akibat yang ditimbulkan lian.....	29
BAB III BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	32
A. Biografi imam Hanafi.....	32
B. Gambaran umum tentang Kompilasi Hukum Islam.....	39

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN IMAM HANAFI DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM TENTANG STATUS PERNIKAHAN SETELAH
TERJADI LIAN.....53**

- A. Pendapat Imam Hanafi Tentang Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian.....53
- B. Pendapat Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian57
- C. Analisis Pendapat Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian.....59

BAB V PENUTUP.....63

- A. Kesimpulan.....63
- B. Implikasi Penelitian.....65

DAFTAR PUSTAKA.....67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat



ABSTRAK

NAMA : SRI EKAYANTI

NIM : 10300116081

Judul Skripsi : Status Permikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam)

Lian berasal dari kata la'ana yang berarti menuduh atau melaknat. Menurut istilah lian berarti tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina atau ia mengingkari bayi yang ada dalam kandungan istrinya bukan dari benihnya, tetapi dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya serta rela mendapatkan laknat oleh Allah bila tuduhan tersebut tidak benar Atas dasar itu penulis menganalisis pendapat dari mazhab Imam Hanafi dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam dua sub masalah permasalahan, yaitu: 1) bagaimana akibat yang ditimbulkan setelah terjadi lian? 2) bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status pernikahan setelah terjadi lian.

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) . selanjutnya metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu kutipan langsung yaitu peneliti mengutip secara langsung pendapat atau tulisan seseorang sesuai dengan aslinya tanpa merubahnya dan kutipan tidak langsung yaitu mengutip tulisan, data dan pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dengan susunan yang baru, tetapi dengan maksud yang sama.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan Kompilasi Islam mengenai status pernikahan setelah terjadi lian yaitu Imam Hanafi berpendapat apabila terjadi lian maka terjadi perpisahan tetapi mereka masih dapat kembali dengan syarat melakukan akad nikah baru karena menurut beliau perpisahannya merupakan talak ba'in sugra. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa status pernikahannya haram untuk selamlamanya.

Adapun implikasi dari penelitian tersebut agar kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti berikutnya serta bagi mahasiswa hukum dalam memahami lian sehingga tidak terjadi kesalahpahaman serta dijadikan suatu pembelajaran agar kiranya tidak ada lagi yang melakukan lian yang akan disesali di kemudian hari.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan umatnya secara berpasang-pasangan. Ada adam maka ada pula hawa, yang kemudian Allah mempersatukan mereka. Adapun sebagian kecil hikmah manusia diciptakan menjadi dua jenis tersebut adalah dengan tujuan untuk melangsungkan sesuatu yang dinamakan pernikahan, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmah, yang terdiri dari istri shalihah, suami yang jujur dan tulus, serta memiliki putra-putri yang patuh dan taat dan kerabat yang membangun silaturrahmi dan saling tolong menolong. Hal tersebut dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiya*, (Bandung: Angkasa, 2005), h.134.

² Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), h.77.

Allah Swt juga juga berfirman didalam dalam Q.S Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَرَئَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia tercipta untuk saling berpasang-pasangan. Dimana ayat pertama menjelaskan mengenai adam dan hawa yang diciptakan sebagai manusia pertama kali, serta menjadi permulaan dari terciptanya laki-laki dan perempuan selanjutnya. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan tujuan diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan yakni untuk memberikan ketenangan hati bagi mereka dan saling berbagi cinta dan kasih sayang yang tertuang dalam ikatan pernikahan.

Nikah secara etimologis (*lughah*) yang berarti berkumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) nikah merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang (haram). Pernikahan dikatakan sah antara seorang pria dan seorang wanita jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya sehingga menyebabkan hubungan keduanya menjadi halal bahkan berpahala, yang sebelumnya hukumnya haram dan berdosa.⁴

³Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 413.

⁴Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah* (Cet I;Jakarta: Zakia Press, 2004), h.1-2.

Dalam Islam pernikahan adalah sebuah ibadah dan juga merupakan sunnah rasul yang telah jelas jika dilaksanakan akan mendapatkan segala kebaikan duniawi dan ukrawi. Nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik apabila dengan niat yang baik maka akan dicatat oleh Allah sebagai Ibadah.⁵

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya. Maka beliau memerintahkan agar yang menjadi pertimbangan utama ialah Agamanya. Apabila hal ini di laksanakan maka sang suami akan mendapat keuntungan.⁶

Di dalam Alquran telah dijelaskan beberapa situasi dalam kehidupan antara suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Seringkali kegaduhan yang terjadi dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang telah di tetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harusnya terpenuhi oleh kedua belah pihak.⁷ Sedangkan dalam ajaran Agama Islam telah menetapkan aturan bagi seseorang yang ingin bercerai. Meskipun begitu bukan berarti Allah rida dengan hal itu, tetapi sebaliknya perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi di benci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari

⁵Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, h. 5.

⁶Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000), h.12.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* edisi 1 (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2009), h.190.

keretakan.⁸ Faktor yang sering kali menjadi awal dari kehancuran sebuah pernikahan ialah adanya suatu penghianatan yang telah mengarah kedalam perzinahan.

Zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima oleh akal dan dilarang oleh semua Agama.⁹ Dinyatakan oleh Agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat buruk dan juga dapat mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free sex*) dan segala bentuk hubungan yang diluar ketentuan agama merupakan perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat.¹⁰

Zina menurut Ensiklopedi hukum Islam adalah adanya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum terikat dalam suatu pernikahan. Menurut fuqaha kalangan Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan secara sadar yang disertai dengan nafsu diantara mereka dan sama sekali tidak ada ikatan pernikahan yang sah diantara keduanya.¹¹ Disamping itu merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra/32:17

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ۚ
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

⁸Ramadhan Syahmedi Siregar “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh”, *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, [t.th.], h.1.

⁹Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Cet I; Jakarta: Qisthi Press:2005), h.17.

¹⁰Sayyid Sabiq *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah Jilid IX*(Cet.XVI; Bandung: Pt. Alma`rif, t.th), 87.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI (Cet I; Jakarta: Ichitan Baru Van Hoeve, 1996), h. 2026.

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹²

Zina merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan yang besar. Diantaranya, menularnya penyakit yang sangat membahayakan, menimbulkan terjadinya pembunuhan karena sifat atau rasa cemburu yang sudah jadi watak manusia, mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, dan memutuskan tali pernikahan, Islam telah menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku zina. Tetapi hukuman tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat.¹³

Hukuman yang telah ditetapkan bagi pelaku zina yakni rajam bagi pelaku zina yang telah menikah dan hukuman cambuk bagi yang belum menikah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.¹⁴

¹²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.285.

¹³Sayyid Sabiq *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Nabhan Husein, h.88.

¹⁴Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, h.350.

Ketika dua insan telah menjalin sebuah pernikahan, maka keduanya pun berjanji untuk membina serta memupuk tali ikatan pernikahan yang di ridai oleh Allah SWT dengan jalan setia terhadap pasangannya. Namun terkadang dalam menjalani sebuah ikatan pernikahan biasanya terjadi sebuah perceraian dan melupakan janji dari pernikahan tersebut.

Problematika yang terjadi didalam rumah tangga bisa menimpa siapa pun dan kapan pun. Adanya kecurigaan dalam rumah tangga, berubahnya sikap istri terhadap suami atau istri yang sedang hamil tetapi sang suami sama sekali tidak pernah menyentuhnya atau menyetubuhinya dan lain sebagainya. Hal ini yang dapat mengundang Tanya besar bagi sang suami. Kecurigaan sang suami dalam hal ini bukan tanpa alasan. Bahkan jika sang suami sampai memergoki istrinya telah berhubungan intim dengan pria lain tentu saja akan hal ini yang menyebabkan kekacauan rumah tangga. Terkait dengan masalah tersebut Islam telah mengatur sedemikian rupa yang dalam istilah fikih dinamakan dengan *lian*.¹⁵

Alasan zina dapat dijadikan sebagai permohonan cerai talak, dimana jika sang suami tidak memiliki bukti atas tuduhan yang di tujukan terhadap istrinya, maka hakim di pengadilan dapat menyuruh suami yang menuduh istrinya untuk bersumpah secara *lian*, tetapi sebelum di perintahkan untuk bersumpah *lian* sang istri juga mempunyai kesempatan untuk menyanggahnya apabila tuduhan yang di lontarkan suaminya tidak benar. Tetapi apabila sang istri tidak menyanggahnya atau malah mengakuinya maka dengan itu adalah bukti kuat adanya zina.

Secara harfiah *lian* berarti saling melaknat, sedangkan secara terminologi berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sedangkan dia tidak memiliki empat orang saksi kecuali hanya dirinya sendiri, maka ia harus

¹⁵ Abdullah bin Abd al-Rahman al-Basam, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Mansyur, *Syarakh Bulugh Al-Maram*, Jilid II (Cet III; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 111.

menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atastuduhannya.¹⁶

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam BAB IX, menjelaskan secara umum tentang lian dalam pasal 44, yaitu sebagai berikut:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya tersebut telah berbuat zina dan anak yang dilahirkan tersebut hasil dari perzinahannya.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 126, yaitu lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Sedang dalam pasal 162 menyebutkan bahwa akibat lian adalah:”bilamana lian terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandungnya di nisbatkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.¹⁸

Berdasarkan pasal 126 dengan pasal 162 diatas maka suami-istri yang telah melakukan lian maka mereka tidak bisa membangun rumah tangganya kembali untuk selama-lamanya. Para imam mazhab pun juga berpendapat demikian, kecuali imam Hanafi yang menyatakan bahwa perpisahan akibat lian merupakan talak bain *shugra* dan memungkinkan untuk keduanya bisa bersama

¹⁶Amir Syarifuddin,*Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: kecana,2010),h.138-139.

¹⁷Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group,2016),h.151.

dengan syarat suami mencabut sumpah lian terhadap istrinya dan mengantinya dengan akad nikah baru.

Dari pendapat diatas terdapat perbedaan dalam pengambilan dasar hukum antara imam Hanafi dengan KHI dalam menafsirkan status pernikahan setelah sumpah lian. Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam perbedaan tersebut. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai *"Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian(Studi Komparatif Iman Hanafi dengan Kompilasi Hukum Islam)"*.

B. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang lian?
2. Bagaimana status pernikahan setelah terjadi lian menurut Imam Hanafi dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Pengertian Judul

Guna mempermudah dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas, maka berikut akan diberikan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun penjelasan istilahnya sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁹

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1375.

Pernikahan adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah yang mewajibkan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.²⁰

Sumpah berasal bentuk jamak dari kata *yamiin* yang artinya lawan tangan kiri. sumpah dinamai dengan kata tersebut karena jika orang-orang dahulu saling bersumpah satu sama lain, mereka saling memegang tangan kanan temannya. Dan dikatakan pula, karena dapat memelihara sesuatu seperti halnya dengan tangan kanan. Dalam pengertian syarak, *yamin* berarti "menyatakan atau meneguhkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT., atau salah satu dari sifat-sifatnya".²¹

Lian berasal dari kata *la'ana* artinya mengutuk, karena orang yang melian pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah seandainya sumpahnya berdusta. Lian adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali, bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan dari Allah seandainya ia berdusta.²²

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Tentang Lian.
- b. Pendapat Imam Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian.

²⁰“Pernikahan Dalam Islam”. *Wikipedia the free Encyclopedia*. [http://id.m.wikipedia.org/Pernikahan Dalam Islam](http://id.m.wikipedia.org/Pernikahan_Dalam_Islam) (31 Oktober 2019).

²¹Sayyid Sabiq, *Fikihus Sunna* Jilid XII, (Cet XII; Bandung: PT Alma'arif, T.th.), h.7.

²²T.p. *Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Kahar Mansyur (Cet I; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), h.241.

D. Tinjauan Pustaka

Secara garis besar, sumber teori yang akan digunakan penulis dalam menguraikan tulisan ini adalah: Alquran dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal serta artikel-artikel yang terkait dengan materi lian.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan beberapa literatur atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Literatur atau referensi tersebut merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan dalam skripsi ini. Diantaranya, yaitu:

1. Imi Nadrah Mingka, dalam skripsi yang berjudul “*Kajian Kedudukan Anak Lian Dalam mendapatkan Hak-haknya Sebagai Anak*”, dimana dalam skripsi ini membahas bagaimana kedudukan anak lian dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 162 bahwa anak lian dinasabkan kepada ibunya karena telah diingkari oleh suami ibunya sebagai anak kandungnya.
2. Anwar Hafidz, dalam jurnal Unissula yang berjudul “*Penolakan Nasab Anak Lian dengan Ta’liq*”, dimana dalam jurnal ini membahas anak yang lahir setelah lian maka anak yang lahir tersebut nasabnya diberikan ke ibu yang melahirkannya.
3. Camila Rizky, dalam skripsi yang berjudul “*Perceraian Lian Dalam Perpektif Hukum Islam*”, Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perceraian yang disebabkan oleh Lian dengan prosedur perceraian lian dalam perspektif hukum Islam.
4. Arliyani Handayani, dalam jurnal Universitas Indonesia yang berjudul “*Akibat Hukum Perceraian Lian Terhadap Suami Dengan Istri dan Kedudukan Anak*”, dalam jurnal ini membahas akibat dari perceraian lian

maka pernikahan kembali tidak mungkin dilakukan di antara suami istri yang telah melakukan lian untuk selamanya.

Dari beberapa referensi diatas, penulis menganggap belum ada yang membahas pokok masalah dalam skripsi ini secara spesifik, yaitu “Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam)”. Karena itu, penulis akan mencoba membahas lebih rinci terhadap judul skripsi pada pembahasan di BAB selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan agar dapat memecahkan masalah.²³

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman dan pengertian atas suatu topik, gejala dan atau isu-isu tertentu.²⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif metode yang cenderung menggunakan analisis.

Penelitian kualitatif digunakan untuk menguraikan data yang memiliki hubungan yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, pertentangan antara dua

²³Junaedi Effendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2018), h.3.

²⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h..2.

keadaan atau lebih serta perbedaan antara fakta yang ada pengaruhnya terhadap suatu kondisi.²⁵

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan ini mengonsepskan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²⁶ Selain itu pendekatan normatif berarti berupaya mengkaji hukum yang dikonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat luas.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini bertujuan agar diperolehnya informasi dan data-data yang tentang lian dengan bantuan yang bermacam sumber data yang terdapat di perpustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah skripsi ini. Data-data tersebut bersifat primer, sekunder dan tersier.

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Alqur'an dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam.²⁷ Data sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, pendapat pakar dan sebagainya.²⁸ Sedangkan data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁹

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 56.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. IX; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persaja, 2016), h. 118.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 199.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 31.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 199.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

- a. Kutipan langsung adalah metode pengutipan secara langsung suatu pendapat atau tulisan tanpa atau tulisan tanpa merubah, sama persis dengan aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung adalah metode pengutipan dimana dimana penulis mengutip suatu tulisan atau pendapat yang telah kita formulasikan dalam susunan kata yang baru, namun dengan maksud yang sama.

5. Pengolahan Data dan Analisi Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Setelah data-data yang diperoleh dikelola, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data agar dapat menghasilkan data yang sempurna guna membantu dalam menemukan suatu informasi. Data yang di peroleh dalam penelitian ini diolah dalam metode komparatif atau metode penelitian perbandingan. Metode komparatif adalah metode yang bersifat membandingkan antara dua atau lebih objek atau fakta yang diteliti, baik itu persamaan dan perbedaanya guna memperoleh kesimpulan akhir yang jelas.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui tinjauan umum tentang lian.
- b. Mengetahui pendapat imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam terkait status pernikahan setelah terjadi lian.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan mahasiswa pada umumnya, termasuk juga pada masyarakat bagi yang sudah menikah agar mampu menjaga keutuhan rumah tangganya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah.
- b. Sebagai tambahan referensi dalam kajian yang sama bagi penelitian yang selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LIAN

A. Pengertian Lian

Lian berasal dari kata لَاعَنَ artinya: mengutuk. Sedangkan menurut *syara'* lian berarti kata-kata tertentu yang dijadikan hujjah bagi orang menuduh istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain dan menimbulkan kecemasan padanya.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lian diartikan sebagai sumpah suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah berbohong, masing-masing mrngucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapatkan laknat Allah jika berdusta sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali untuk seumur hidup.²

Al-Qadhi mengatakan “disebut dengan lian karena suami-istri tidak terlepas bahwa salah satunya telah berdusta, sehingga terjadi pelaknatan atas dirinya yakni, yaitu diusir dan dijauhkan. Al-kamal bin Human juga mengemukakan pendapat dengan mengatakan bahwa lian adalah nama dari sesuatu yang terjadi antara suami dan istri, yaitu sejumlah kesaksian yang lazim, di sebut demikian karena adanya lafaz laknat dalam kesaksian yang kelima.³

Dalam pengertian yang lain, lian berasal dari kata *la'n*. Sebab suami istri yang bermula'anah pada ucapan yang kelima kalinya berkata: “sesungguhnya kepadanya akan jatuh laknat Allah, jika ia termasuk orang yang berdusta”. Disebutkan demikian

¹Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husain Al Hamid, *Fiqih Muslimah Ibadah: Mu'amalat* (Cet.II; Jakarta: Pusaka Amani Jakarta, 1995), h.337.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.856.

³Syekh Jasim Muhammad al-Yasin *Fiqh al-Mar'ah in al-Mahdi ila al-Lahdi*, terj. Kaserun As.Rahman *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Cet I; Jakarta: Pt Serambi Semesta, 2017), h.546.

karna setelah terjadi lian maka mereka akan mendapat dosa jika salah satunya berdusta, maka ialah yang akan dilaknat oleh Allah SWT. Ada pula yang berpendapat lain, yaitu masing-masing suami istri dari teman hidupnya tadi untuk selamanya dan haram pula untuk menikah kembali.⁴

Dalam defenisi diatas terdapat kata kunci yang akan memberikan penjelasan terkait hakikat dari perbuatan lian, yaitu sebagai berikut:

1. Kata “sumpah”. Kata ini menunjukkan bahwa lian itu adalah salah satu dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama yang berisi kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya apabila ia berdusta.
2. Kata “suami yang dihadapkan kepada isteri”. Hal ini mengandung arti bahwa lian berlaku diantara suami-istri dan tidak berlaku diluar lingkungan keduanya. Jika ada orang yang tidak terikat oleh tali pernikahan dan saling melaknat maka hal itu tidak disebut dengan lian.
3. Kata “menuduh berzina”. Kata ini mengandung bahwa sumpah dilakukan sebab suami menuduh istrinya berbuat zina, baik ia sendiri menyaksikan istrinya berbuat zina atau menyakini bahwa bayi yang dikandung istrinya bukanlah anaknya.
4. Kata “suami tidak mampu mendatangkan saksi”. Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhan itu suami mampu mendatangkan saksi sebagaimana dipersyaratkan saat menuduh zina, tidak dikatakan dengan lian.

Tetapi dapat melaporkannya apa yang terjadi dan diselesaikan oleh hakim.⁵

⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.250.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta: Putra Grafika,2009),h.288-289.

Berikut ini dalam lian terkandung juga beberapa hikmah yaitu:

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai seorang istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi diantara keduanya. Tetapi jika sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilanglah kepercayaan diri dari isteri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian dan tentu akan membawa akibat buruk.
2. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perbuatan buruk yang mengurangi kehormatan diri.
3. Menjaga kehormatan dari kehinaan pelacuran yang tidak aka pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.⁶

B. Dasar Hukum Lian

Seorang suami yang telah menuduh istrinya berzina tetapi dalam hal ini tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia benar dalam tuduhannya serta rela di laknat oleh Allah jika dia berdusta. Tetapi jika dalam tuduhannya tersebut dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dan tidak pula bersedia melakukan lian maka dia akan dikenakan sanksi atas tuduhan berzina yakni didera dengan delapanpuluh kali pukulan.

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S An-nur/24: 6-7.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h.241.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ
أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpahnya, jika dia termasuk orang yang berdusta”.⁷

Selanjutnya giliran istri yang terancam sanksi zina dengan delapan puluh kali dera jika dia menerima tuduhan suaminya. Tetapi jika dia menyangkalnya diapun wajib bersumpah empat kali bahwa suaminya telah berdusta serta rela menerima azab Allah jika ternyata tuduhan suaminya benar.⁸

Ketentuan tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Q.S An-Nur/24: 8-9.

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar”.⁹

⁷Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), h.350.

⁸Nawami Rambe, *Fiqh Islam* (Jakarta: Duta Pahala: 1994), h.342-343.

⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.350.

Secara historis ayat yang turun ini berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayya, telah menuduh istrinya berzina dengan Sharik bin Sahma', Saat ia berada dalam hadapan Rasulullah. Mendengar tuduhan tersebut lalu Rasulullah bersabda kepadanya “engkau harus mendatangkan saksi, jika tidak maka punggungmu akan didera”. Setelah itu Hilal menjawab “ ya Rasulullah apabila ada di antara kami melihat ada seorang laki-laki diatas istrinya, apakah masih memerlukan mencari saksi, namun jawaban Rasulullah tetap serupa dengan pernyataan sebelumnya, lalu Hilal menjawab kembali “ demi yang telah mengutus engkau dan kebenaran, sesungguhnya aku benar dalam tuduhanku, semoga Allah menurunkan firmanNya ddalam urusanku ini sesuatu yang dapat membebaskan aku dari hukum dera itu”.¹⁰

C. Syarat dan Rukun Serta Cara Pelaksanaan Lian

1. Syarat dan Rukun Lian

Dalam suatu perbuatan baru dikatakan lian apabila telah terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun syarat lian lian dibagi menjadi dua bentuk, yakni: syarat wajib lian dan syarat sah melakukan lian. Para ulama mazhab Hanafi membagi syarat wajib lian ada tiga yakni:¹¹

- a. Adanya ikatan pernikahan dengan seorang wanita, meskipun belum disetubuhi. Begitu juga dengan istri dalam masa iddah talak raj'i.
- b. pernikahannya merupakan pernikahan yang sah dalam Agama dan bukan pernikahan yang fasid.

¹⁰Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pt Bulan Bintang,1998), h.357-358.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, Dkk, *Fiqih Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani,2011),h. 10.

- c. Suami adalah orang yang bisa memberi kesaksian bagi orang muslim.¹²

Sementara itu ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali juga mengemukakan tiga syarat dalam lian, yakni:

- a. Status mereka masih suami istri meskipun belum berhubungan atau bergaul.
- b. Didahului dengan tuduhan zina terhadap istri meskipun melalui dubur, karena hal ini merupakan tuduhan yang mewajibkan had.
- c. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum lian.¹³

Adapun syarat sahnya proses lian menurut Mazhab Hambali ada enam, hal ini pun telah disepakati oleh sebagian para ulama dan sebagiannya tidak.

1. Proses lian dilakukan dihadapan hakim. Syarat tersebut disepakati para ulama. Karena Nabi memerintahkan Hilal bin Umayya untuk memanggil istrinya kedepan beliau dan saling melakukan lian di hadapan beliau.
2. Lian dilaksanakan oleh suami setelah diminta oleh hakim, yaitu masing-masing dari suami istri mengucapkan lian setelah diberi arahan oleh hakim. Jika salah satunya melakukan lian tanpa memperhatikan arahan yang diberikan oleh hakim, maka lian tersebut dianggap tidak sah.
3. Menyempurnakan kelima lafal lian, jika kurang satu lafal maka dianggap tidak sah dan penyebutannya lafalnya pun harus secara jelas. Syarat inipun telah disepakati oleh para ulama.
4. Lafal yang di ucapkan pun harus sesuai denganapa yang ada didalam Al-quran. Terdapat perbedaan ulama jika lafal diganti dengan lafal lain. Lafal

¹²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1009.

¹³Syekh Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Fiqh al-Mar'ah Min al-Mahdi ila al-Lahdi*, terj. Kaserun AS. Rahman *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, h. 548.

“sesungguhnya saya adalah orang yang benar” diganti dengan lafal “sesungguhnya dia telah berzina”. Atau lafal “bahwa dia (suami) termasuk orang yang berdusta” diganti dengan “sesungguhnya ia telah berdusta”. Jika lafal pengganti itu adalah salah satu lafal sumpah seperti “ahlifu” dan “aqsimu” (keduanya berarti saya bersumpah). Menurut Ulama Syafi’i dan Hambali, tidakbisa digunakan dalam lian. Menurut mereka kalimat yang diperbolehkan itu hanya kalimat “asyhadu” (saya bersaksi). Pendapat tersebut juga dianut oleh Maliki dan Hanafi.

5. Proses lian harus berurutan, yang dimulai dengan sumpah suami empat kali dan kelima suami melaknat dirinya. Tidak boleh sebaliknya dan juga tidak boleh dirubah.
6. Jika suami istri itu hadir dalam persidangan lian, maka keduanya boleh mengajukan syarat untuk menunjuk pihak lain.¹⁴

Setelah terpenuhinya syarat lian maka suami istri itupun harus memenuhi rukun yang ada dalam lian.

Rukun pertama yaitu suami. Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dia merupakan orang yang menuduh istrinya berbuat zina, maka suami harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Dia adalah orang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, yaitu dewasa, sehat akalnya, serta berbuat dengan kesadaran. Jika suami itu belum dewasa ataupun tidak sehat akalnya dan atau melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa sumpah yang diucapkannya tidak sah dan bila dia menfitnah

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1011.

pun tidak akan dikenakan hukuman *qazf* , dengan demikian lian yang diucapkannya pun tidak sah.

- 2) Dia adalah muslim, adil serta belum pernah dihukum karena *qazf*. Ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya: Al- Tsawry, Al Awza'iy, Ulama *Ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat Imam Ahmad, sedangkan ulama lain diantaranya Imam Malik, Ishaq, Al- Hasan, Said bin Al-Musayyab dan Imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan kata lain lian dapat juga dilakukan oleh yang bukan muslim serta orang yang tidak memenuhi syarat adil.
- 3) Dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya terhadap istrinya. Dalam hal ini jika seandainya suami memiliki bukti yang lengkap maka tidak boleh lagi menempuh jalan lian karena lian itu sendiri merupakan pengganti tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.¹⁵

Adapun rukun yang kedua yaitu istri. Ditinjau dari segi istri merupakan orang dituduhberzina oleh suaminya, yang patut dikenai sanksi berzina, maka ia harus memenuhi syarat sah lian sebagai berikut:

- 1) Dia adalah seorang yang *mukallaf* dalam arti sudah dewasa, berakal, dan berbuat dengan kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan lian baik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan suaminya.
- 2) Ia adalah isteri yang masih terikat tali pernikahan yang sah dengan suaminya. Karena lian hanya berlaku bagi suami istri dan tidak berlaku bagi yang lain.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 294.

- 3) Ia adalah seorang yang *muhsan*, yaitu orang yang bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.¹⁶

2. Cara pelaksanaan lian.

Pelaksanaan lian sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam dan penerapan pelaksanaan perceraian lian di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Majelis hakim memerintahkan kepada pihak suami untuk mengucapkan sumpah lian dihadapan sidang pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut: “ Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina”. Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pihak suami sebanyak empat kali sebagai berikut: “ Wallahi, Demi Allahsaya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya”. Kemudian pihak suami mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut:”saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta”.
- b. Majelis hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah lian dihadapan sidang pengadilan Agama. Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut:“wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”.Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh temohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut:

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 294.

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina dan anak yang ada di dalam kandungan saya adalah anak suami saya”.dan pihak istri mengucapkan sumpah kelima selama satu kali, sebagai berikut: “saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta”.¹⁷

D. Gambaran Umum Tentang Lian

Hendaklah suami mengucapkan kalimat berikut sebanyak empat kali: “aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku adalah orang yang jujur atas zina yang aku tuduhkan kepadanya (istri). Sambil menunjuk kearah istrinya jika ada .Jika istrinya tidak ada, maka dengan menyebut namanya atau menisbahkan kepada sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Kemudian dalam kalimat kelima, ia menambahkan bahwa laknat Allah akan menimpah dirinya apabila ia termasuk orang yang berdusta.

Kemudian istrinya berkata, “aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia adalah orang yang berdushta tentang zina yang dituduhkan kepadaku”. Lalu, dalam kesaksian kelima, ia menambahkan bahwa murka Allah akan menimpa dirinya apabila suamiya berkata benar.

Disunnahkan agar suami istri saling mengucapkan lian sambil berdiri. Dan hendaklah diucapkan di hadapan jamaah yang tidak kurang dari empat orang karena isteri bisa jadi mengakui hingga mereka bisa menjadi saksi atas istri dan hendaklah hakim menyuruh seseorang yang akan meletakkan tangan pada mulut suami dan istri dalam kesaksian kelima dan berkata, “bertaqwalah kepadalah Allah, karena kesaksian kelima ini menentukan”. Azab duania itu lebih ringan dibandingkan azab diakhirat karena azab dunia akan berakhir sedangkan azab akhirat itu abad.¹⁸

¹⁷Zaisika Khairunnisak,”Perceraian Lian dan Akibar Hukum Dalam Perspektif Fiqih”, *Premise Law Jurnal*,2015, h.8-9.

¹⁸Syekh Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Fiqh al-Mar’ah Min al-Mahdiila Al-Lahdi*, terj. Kaserun AS.Rahman,*Tuntas Memahami Fiqih Wanita*,h.547.

E. *Lian termasuk talak atau fasakh*

1. Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah syari'at, talak diartikan memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan.²⁰

Didalam hukum Islam telah menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal tersebut disebabkan karena suami yang mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu pernikahan. Baik tanggung jawabnya membayar mahar kepada istri, maupun tanggung jawabnya member nafkah terhadap anak dan istrinya. Karena hak talak terletak pada suami, maka suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang akan mengakibatkan jatuhnya talak. Hal yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak adalah hak penuh seorang suami yang tidak memiliki dasar baik dalam Al-quran maupun Hadsit nabi. Yang demikian hanyalah kebiasaan orang Arab yang terbawa dari masa sebelum Islam. Pada zaman jahiliyah banyak laki-laki yang dengan sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan dengan seenaknya. Akan tetapi pada saat itu, istrinya masih menjadi istrinya meskipun telah diceraikannya berulang kali.²¹ Dengan adanya peristiwa

¹⁹M.A Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6.

²⁰Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 95.

²¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), h. 88-89.

suami yang mempermainkan kata talak, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.²²

Secara garis besar di tinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, maka talak dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Talak *raj’i*
- b. Talak *bain*.

Talak *raj’i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah ia gauli. talak ini berlaku terhadap talak yang dijatuhkan sebanyak 1 kali atau yang kedua kalinya. Dr. As-Siba’i mengatakan bahwa talak *raj’i* adalah talak yang untuk

²²Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* ,h.36.

kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan akad nikah baru, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya dengan suami hendak kembali kepada bekas istrinya sebelum berakhir masa iddahnya maka hal ini dapat dinyatakan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu, kedudukan talak menjadi talak bain.²³

Sedangkan talak bain adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa iddahnya. Talak bain ada dua macam, yaitu talak bain *shugra* dan talak bain *qubra*.

- a. Talak bain *shugra* (kecil), yaitu talak yang si suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, namun sang suami dapat rujuk dengan mantan istri jika ia melakukan akad nikah baru. Maksudnya apabila talak ini telah jatuh maka putuslah pernikahan suami dan istri tersebut. Namun mantan suaminya dapat rujuk kembali dengan mantan istrinya dengan pernikahan kembali setelah habis masa iddah mantan istrinya tersebut.²⁴
- b. Adapun talak bain *qubra* adalah talak yang tidak boleh bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.²⁵

²³ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.196-197.

²⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h.90.

²⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khosin (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2012), h.61.

2. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan pernikahan. Fasakh dapat terjadi jika sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang sebelum berlakunya akad. Perceraian dikarenakan fasakh berbeda dengan perceraian karena talak .²⁶

Terjadinya fasakh karena telah terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan atau terjadi karena sesuatu hal yang dialami setelah terjadinya akad nikah dan setelah perkawinan berlangsung. Fasakh pada jenis *pertama*, semisal suami istri yang telah melangsungkan kehidupan rumah tangga, tiba-tiba diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara susuan, maka sejak diketahuinya hal itu, maka hubungan pernikahan mereka menjadi batal meskipun mereka telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah. Pernikahan mereka dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada mahram antara laki-laki dan perempuan. Fasakh pada jenis *kedua*, yaitu karena terjadi hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan pernikahan berlangsung, misalnya suami istri beragama Islam, tiba-tiba suami murtad atau keluar dari Agama Islam. Apabila si istri ini telah mengusahakan dengan baik agar suami kembali beragama Islam tetapi ia tetap mengutamakan Agamanya yang baru, maka hubungan perkawinan mereka diputuskan, sebab terdapat penghalang pernikahan yaitu larangan menikah antara muslimah dengan laki-laki yang beragama non muslim.²⁷

²⁶Sa'id Thalib Al-Hamdani *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Cet III; Jakarta: Pustaka Amani, 1988), h. 272.

²⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 143.

Menurut ulama jumhur, perceraian perkawinan dengan cara lian itu termasuk dalam kategori fasakh, karena kedua macam perceraian tersebut mengakibatkan tidak dapat kembali untuk selama-lamanya dan jika terjadi fasakh maka pihak wanita tidak berhak lagi menerima nafkah dan tempat tinggal selama proses lian terjadi. Sedangkan imam Hanafi ternyata memiliki pendapat yang berbeda terkait lian menurut beliau perceraian dengan jalan lian itu tergolong talak bain. Karena prosesnya tetap dari pihak suami.²⁸

F. Akibat yang Ditimbulkan Oleh Lian.

Akibat yang ditimbulkan dari sumpah lian berpengaruh bagi suami-istri yaitu menimbulkan pula perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak. Perubahan tersebut antara lain:

1. Pemisahan hubungan suami dan istri

Apabila suami istri melakukan lian saling menuduh dan saling melaknat maka status mereka harus dipisahkan. Hal ini berdasarkan hadist Ibnu Umar R.a ia berkata , “sepasang suami istri dari kalangan anshar saling melaknat (lian) dihadapan nabi Saw. Kemudian beliau menceraikan keduanya”.

2. Diharamkan selamanya

Perceraian yang ditimbulkan dari saling melaknat ialah hubungan keduanya tidak diperbolehkan bersama lagi selama-lamanya. Hal tersebut juga didasari atas hadist Nabi, dari perkataan Sahl bin Sa’ad, “telah ditetapkan oleh as-sunnah untuk kedua orang yang saling melaknat (lian) agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak dapat bersatu kembali selamanya”.

²⁸Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, h.361-362.

3. Hak mahar dan Nafkah

Seorang wanita yang dilaknat atas tuduhan berzina, masih berhak mendapatkan mahar dan nafkah iddah yang ada pada dirinya. Hal tersebut berdasarkan hadist Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata “ aku bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana hukumnya sorang suami yang menuduh isterinya berzina, lalu ia menjawab dahulu Rasulullah Saw. pernah menceraikan sepasang suami istri dari bani ‘Ajlan, lalu beliau bersabda, Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdusta, apakah diantara kalian ada yang bertaubat, tapi keduanya menolak. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta apakah diantara kalian ada yang bertaubat, keduanya tetap menolak, kemudian beliau menceraikan keduanya”. Ayyub berkata “Amr bin Dinar berkata kepadaku, sesungguhnya didalam hadist ada sesuatu yang belum engkau sampaikan yaitu: “suami itu berkata, bagaimana dengan harta pemberianku, beliau bersabda engkau tidak lagi mempunyai hak atas harta itu, apabila engkau benar (dengan tuduhan itu), sesungguhnya engkau telah menggaullinya, namun apabila engkau dusta maka harta itu akan lebih jauh lagi dari dirimu.

4. Nasab anak kepada istri yang dilian

Ketika suami, istri bercerai melalui lian, jika ada anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya . Hal ini berdasarkan hadist Ibnu Umar, “Sesungguhnya nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminta sepasang suami istri untuk sumpah lian, lalu beliau meniadakan hubungan nasab suami dengan anak istrinya . kemudian beliau menceraikan keduanya dan menisbatkan anak kepada istri yang dilian”.

5. Saling mewarisi

Apabila terjadi lian mula'anah berhak mendapatkan warisnya, tapi hanya ditetapkan antara istri dan anaknya saja. Berdasarkan perkataan Ibnu Syhihab dalam hadist Sahl bin Sa'ad: "menjadi ketetapan hukum (sunnah) setelah kejadian mereka berdua, untuk menceraikan mereka berdua yang saling melaknat ketika istri sedang hamil, maka anaknya di nisbatkan kepada ibunya". Ia melanjutkan, "kemudian berlaku hukum (sunnah) dalam pewarisan istri bahwasanya ia mewarisi anaknya dan anaknya mewarisi darinya sebagaimana yang Allah tetapkan baginya."²⁹

Sumpah lian juga mengakibatkan suami mendapatkan hukuman had jika ia menuduh istrinya tanpa mendatangkan bukti atau empat orang saksi. Hukuman had tersebut yakni didera sebanyak 80 kali, dijatuhkan kepada orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan hukuman ta'zir kepada orang yang menuduh orang yang tidak muhsan berzina. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah An-nur ayat 4 dan 5.³⁰

Jika proses lian telah berakhir, maka berlakulah akibat sebagai berikut:

- 1) Ia suami terbebas dari ancaman had qazaf dalam artian tuduhan yang dilontarkan kepada istrinya itu dinyatakan benar.
- 2) Tuduhan suami betul terjadi atau ternyata dalam hukum isteri telah berzina.
- 3) Hubungan nasab antara suami yang melian dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepadanya.

²⁹ Anwar Hafidzi, "Penolakan Nasab Anak Lian dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Dengan al-Mughni", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2018, h. 83-85.

³⁰ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994), h. 137.

- 4) Istri yang dilian bebas dari ancaman had zina, dengan begitu secara hukum ia tidak betul berzina.
- 5) Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya.³¹



³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 296

BAB III

BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN GAMBARAN UMUM MENGENAI KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Biografi Imam Hanafi

1. Riwayat hidup

Nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit Al-kufa atau Hanafi, beliau dilahirkan pada 80 Hijriah (699 M). Abu Hanifah dilahirkan pada masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayyah yang ke V). Masa kecil beliau sangat tekun belajar Agama serta sangat menghayati sesuatu jika ada hal yang ia pelajari, maka ia dianggap seseorang yang Hanif. Imam Hanifah juga sangat rajin dalam menulis hadis-hadis dan apabila ia hendak berpergian maka ia selalu membawa tinta.¹

Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang gemar belajar, taat beribadah dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban Agama. Kata Hanif dalam bahasa Arab, yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar, kakeknya bernama Al-Zautha penduduk Asli Kabul, ia pernah menjadi tawanan dalam suatu peperangan lalu ia dibawa ke Kufah sebagai budak, setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya. Ayahnya bernama Tsabit.² Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi, (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan ayahnya sudah berpindah ke Kufah. Oleh karenanya beliau bukan keturunan Arab yang asli. Ayah beliau sendiri dilahirkan dalam memeluk Agama Islam. Bapaknya adalah sebuah pedagang dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Sedangkan ibu Abu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-

¹ Muammar Bakry, *Etika dan Praktik Bermazhab: Membangun Toleransi Antar Umat* (Cet I; Gowa Alauddin University Press, 2013), h. 93.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), h. 106.

ahli sejarah, tetapi walaupun demikian beliau sangat menghormati ibunya. Pada suatu masa dia pernah membawa ibunya ke majelis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana mematuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kenapa kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa mendapatkan kesesatan.³

Pada saat remaja Abu Hanifah telah memperlihatkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, terutama yang bersangkutan dengan hukum Islam dengan melakukan perjalanan ke beberapa daerah untuk mencari hadis dan ilmu pengetahuan. Meskipun ia saudagar yang kaya namun beliau merupakan orang yang sederhana, begitu pula saat menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak disedekahkan dari pada untuk kepentingan pribadinya.⁴ Pada mulanya beliau gemar mempelajari ilmu qira'at, hadist, nahwu, sastra, syi'ir, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu, diantara ilmu-ilmu yang diminatinya adalah teologi (ilmu kalam), sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu. Lantaran ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menanggapi serangan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqih, dikufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional.⁵

Keahlian Abu Hanifah dalam fikih dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa beliau merupakan tokoh sekaligus pemimpin seluruh ulama fikih, karena perhatiannya yang begitu begitu besar terhadap Hukum Islam, Abu Hanifah kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya bergerak para ahli fikih dan

³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab* (Cet III; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 15.

⁴ Muammar Bakry, *Etika dan Praktik Bermazhab: Membangun Toleransi Antar Umat*, h. 93.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 106.

diketuai langsung oleh beliau. Majelis ini menjadi tempat sharing para ulama tentang hukum Islam, dalam bidang ibadah maupun muamalah. Al-Fudhail Bin Iyad berkata: “Abu Hanifah seorang yang ahli fikih dan terkenal keilmuannya, dikenal sangat wara’, memiliki banyak harta, sangat memuliakan serta menghormati orang-orang yang berada disekelilingnya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, tidak banyak bicara kecuali menjelaskan tentang apa yang halal dan haramnya suatu perkara ia sangat piawai menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta penguasa.”⁶

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah, ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain berpendapat bahwa, beliau mendapat gelar Abu Hanifah sebab beliau adalah seorang yang gelar beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh mengerjakan kewajiban terhadap Agama. Karena perkataan “hanif” dalam bahasa Arab artinya “cenderung atau condong” kepada Agama yang benar. Dan ada juga yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapatkan gelar Abu Hanifah lantaran karena hidupnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” lughat Irak, artinya “dawa atau tinta” yakni beliau dimana-mana senantiasa mendapat dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapatkan gelar Abu Hanifah.⁷

Abu Hanifah memiliki ciri-ciri yakni berperawakan sedang dan termasuk orang yang memiliki postur tubuh yang ideal, memiliki logat bicara yang bagus, memiliki suara yang merdu saat bersenandung, dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya. Abu Hanifah memiliki kulit

⁶ Muammar Bakry, *Etika dan Praktik Bermazhab: Membangun Toleransi Antar Umat*, h. 94.

⁷ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Cet X; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 19.

yang sawo matang serta memiliki badan yang tinggi. Beliau juga memiliki wajah yang tampan, beriwibawa, dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Selain itu ia tidak mencampuri persoalan yang bukan urusannya. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Abu Hanifah juga gemar bergaul dengan suadra-saudaranya dan kawan-kawannya yang baik-baik, beliau tidak suka bergaul dengan sembarangan orang, dan berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung dalam hatinya dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, juga tidak takut dicela ataupun dibenci terhadap orang lain dan tidak pula gentar menghadapi bahaya yang akan menghampirinya.⁸

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah semasa kecilnya telah menghafal Alquran sebagaimana kebiasaan orang-orang saleh lainnya. Pada saat remaja Imam Hanafi mulai menekuni belajar Agama dari ulama-ulama terkemuka dikota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan Sembilan atau sepuluh dengan sahabat nabi diantaranya Anas bin Malik, Sahl bin Sa'd, Jabir bin Abdullah, dll.⁹

Saat beliau berusia 16 tahun, ia pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Saw. Madinah Al-Munawwaroh. Didalam perjalanannya tersebut ia berguru kepada tokoh tabi'in dan sisanya dari kalangan tabi' at-tabi'in. Jumlah guru yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran karna beliau banyak menempuh perjalanan serta berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu Agama.¹⁰

⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab*, h. 13

⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab*, h. 13.

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab*, h. 15.

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Dari penuturan sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah belajar ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali, Ibnu Abi thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, sehingga beliau terkenal sebagai seorang yang ahli ilmu fikih dan tauhid, diantara para guru yang mengajarnya yaitu Hamid bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari, ia begitu banyak memberikan pelajaran kepada Abu Hanifah, sehingga beliau begitu menguasai bidang ilmu fikih dan tauhid berkat gurunya. Setelah hamid meninggal dunia, Abu Hanifah pun melanjutkan untuk mengajar ilmu fikih dan menggantikan gurunya. Nama Abu Hanifah pada masa itu terkenal keseluruh negeri, untuk mengenang jasa-jasa gurunya tersebut.

Abu Hanifah juga mempelajari ilmu tajwid dari seseorang yang sangat menguasai ilmu tajwid yakni Idris bin Asir. Abu Hanifah sangat terkenal sebagai orang sangat terlatih dalam mengikuti kaidah qiyas, sehingga kaidah ini pun berkembang menjadi salah satu dasar hukum Islam. Pada masa itu Abu Hanifah menggantikan gurunya yang sedang berpergian, lalu pada saat itu beliau menerima banyak pertanyaan yang diajukan kepadanya dan seketika beliau pun menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu gurunya pun telah kembali dari pengembaraannya, Abu Hanifah pun meminta kepada gurunya agar memeriksa jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaan yang diajukan kepadanya dan gurunya pun menyetujuinya. Setelah gurunya pun meninggal dunia, maka ia melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan kedudukan gurunya, dan murid-murid gurunya pun datang kepada Abu Hanifah untuk belajar.¹¹

¹¹ Muammar Bakry, *Etika dan Praktik Bermazhab: Membangun Toleransi Antar Umat*, h. 94.

Abu Hanifah ketika berkunjung ke Madinah untuk kedua kalinya, beliau bertemu dengan Muhammad Bagir dari Syi'ah dan putra Imam Bagir yakni Ja'far Al-Sidiq, beliau juga mendapatkan banyak ilmu dari ulama ini.

Hal yang paling menonjol dari fiqh Imam Abu Hanifah yaitu antara lain:

1. Sangat logis, mementingkan maslahat serta manfaat.
2. Mudah difahami dari mazhab yang lain.
3. Lebih liberal sifatnya terhadap dzimiz (warga Negara yang non muslim).

Hal ini dapat difahami karena cara beristinbat selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada didalam nash yang tersurat yaitu illat-illat dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah yang tidak ada nashnya maka beliau menggunakan *qiyas, istihsan, urf*.¹²

4. Murid-murid Abu Hanifah

Berikut murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal didunia Islam diantaranya adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim Ansyary (113-182 H), beliau menjadi hakim Agung yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para hakim di daerah pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid. Beliau juga sebagai mujtahid yang mutlak (mujtahid yang menguasai seluruh disiplin ilmu fikih). Ia menyusun kitab dengan judul "Al-Kharaj" yang membahas tentang hukum pajak tanah.
- b. Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibany (132-189 H). Lahir di Damaskus (Syuriah) dan besar dikufah dan menimbah ilmu diBagdad serta menimbah Ilmu kepada Abu Hanifah. Beliau inilah termasuk murid Abu Hanifah yang banyak selalu menyusun dan mengembangkan hasil karya

¹² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 131.

Abu Hanifah yang terkenal diantaranya ialah: Al- Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu: kitab Al-Mabsuh, kitab Al-Ziyad, kitab Al-Jami' Al-Shaghir, kitab Al-Jumi' Al-Kabir, kitab Al-Sirayul kabir, dan kitab Al-Siyarul Shaghir.

- c. Zufar bin Huzail (110-158 H) beliau merupakan salah satu pengikut Abu Hanifah yang mengikuti contoh gurunya yang menolak tawaran sebagai qadhi meskipun banyak sekali tawaran yang menarik yang disodorkan kepadanya. Ia lebih memilih untuk mengajar, yang terus dilakukannya sampai beliau wafat pada usianya ke 42 tahundi Basrah.
- d. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu (144-204 H). Beliau merupakan qadhi dikota Kufah, kitab karangan beliau yakni: Al-Qadhi, Al-Khisal, Ma'ani Al-Iman, Nafakat, Al-Kharaj, Al-Faraidh, Al-Wasaya dan yang terakhir yaitu Al-Amani.¹³

5. Karya-karya Abu Hanifah

Adapun karya kitab yang ditulis oleh Abu Hanifah antara lain:

1. Asy-Syurut kitab ini membahas terkait dengan perjanjian.
2. Al-Faraid kitab ini terkhusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
3. Al-Fiqh al-Akbar yang membahas ilmu kalam dan teologi yang diberi penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Magnisawi.

Fiqh Imam Abu Hanifah memiliki ciri khas yakni berpijak pada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau pereampasan kemerdekaan, dalam pandangan syariat

¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab*, h. 21-22.

wajib untuk dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan bahwa Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah Saw. melalui mimpi atau pertemuan fisik.¹⁴

B. Gambaran Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

Agar dapat memperoleh pengertian tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, sebaiknya perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan juga asal usulnya. Penjelasan tersebut sangat diperlukan mengingat kenyataan yang menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan kendati dikalangan pengkajian hukum sekalipun.¹⁵

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah tersebut kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama kompilasi.¹⁶

Kompilasi menurut bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku ataupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau kumpulan buku yang memuat uraian ataupun bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum maupun juga aturan hukum.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kompilasi merupakan kumpulan yang

¹⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 132.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I (Jakarta: Akademika Pressido, 1992), h. 9.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, h. 10.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, h. 12.

tersusun secara teratur (mengenai daftar informasi, karangan dan lain sebagainya).¹⁸ Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku tersebut telah terbagi kedalam beberapa bab dan pasal yakni sebagai berikut: Buku I didalamnya terdapat hukum perkawinan yang terdiri dari 19 bab dengan jumlah pasal 170, buku II hukum kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan 214), buku III yakni hukum perwakafan, terdiri dari 5 bab dengan jumlah 14 Pasal (dari pasal 215 sampai dengan 228).¹⁹

Kompilasi Hukum Islam secara materi dapat dikatakan sebagai hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan sebagai hukum yang tertulis dikarenakan sebagian materi dari Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau menunjuk materi perundang-undangan yang berlaku, yang salah satunya seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan lain sebagainya. Selanjutnya dikatakan hukum yang tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi fiqh atau ijtihad para ulama serta kesepakatan para peserta lokakarya. Kondisi Kompilasi Hukum Islam yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan itu yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam disikapi dengan beragam oleh Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Tinggi Agama (PTA).²⁰

Dengan demikian penulis dapat merumuskan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam yakni ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.584.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 267.

²⁰ Wahyu Widiana "Aktualitas Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", *Jurnal Mimbar Hukum*, 2002. h.37.

sistematis dimana bentuknya menyerupai peraturan perundang-undangan yang sedapat mungkin diterapkan di seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah serta bidang yang telah diatur didalam kompilasi Hukum Islam .

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu dari sekian banyak karya umat muslim di Indonesia yang dalam rangka memberikan arti yang positif bagi kehidupan beragamanya untuk kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Dengan begitu jika orang membacanya maka akan memberikan penilaian tingkat kemampuan umat muslim dalam proses pembentukan hukum. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam harus dipandang sebagai salah satu jenjang dalam usaha sekaligus menjadikan batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa yang akan datang.²¹

1. Latar Belakang dan Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Secara faktual peradilan Agama telah ada sejak tahun 1882. Namun didalam mengambil keputusan dalam suatu perkara Nampak jelas bahwa para hakim belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum yang tertulis dan masih banyak tersebar diberbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk menangani kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan.²²

Upaya dalam menyusun Undang-undang perkawinan pada mulanya dimulai pada tahun 1960an yang berujung lahirnya Undang-undang pertama di Indonesia yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, h. 6.

²² Asriati "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Dikti*, 2012. h.24.

soal perkawinan secara materil. Pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan telah diatur oleh beberapa ragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga Negara Indonesia asli yang beragama Islam. Ordonasi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan Cina, peraturan perkawinan campuran. Dengan demikian salah satu tujuan Undang-undang perkawinan adalah Univisi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.²³

Dalam sejarah hukum Islam, telah terjadi pergeseran kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang telah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum islam sehingga menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode:

1) Periode awal sampai tahun 1945

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1945 yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang- undangan serta dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Agama Islam. Kerajaan-kerajaan yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu diantaranya kerajaan samudera pasai di Aceh utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dan beberapa kerajaan lainnya.²⁴

²³ Asriati "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", h.25.

²⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet II; Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.1-2.

Hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda telah diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdientige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkara perdata antara sesama orang bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan bumiputra, maka mereka harus tunduk kepada putusan hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut Undang-undang Agama atau kentuan mereka. Pada saat itu, *Staatsblad* 1882 No.152 belum ada ketentuan terkait dengan kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan yang di antaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal dan wakaf.²⁵

2) Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1985

Setelah Indonesia merdeka terdapat sebuah kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidaklah tertulis dan tersebar diberbagai kitab yang berbeda-beda sehingga penjelasan mengenai suatu masalah pun sering berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada masa ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam kearah tertulis yang termuat dalam penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang didalamnya menjelaskan hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat muslim) yang di kerjakan oleh penyidik hukum perkawinan yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan .²⁶

²⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h.2-3.

²⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h.6.

Peristiwa tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 pada tanggal 18 februari 1958 sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang berisi anjuran kepada para hakim Peradilan Agama agar menggunakan 13 kitab sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Adapun 13 kitab-kitab fiqh Mu'tabarah sebagai berikut:

- a. *Syaqawih 'Ala al-Tahrir.*
- b. *Tuhfah.*
- c. *Qalyubi Al-Mahalli.*
- d. *Al-Bajuri.*
- e. *Fath al-Mu'in dan Syarah.*
- f. *Tarqib al-Musytaq.*
- g. *Mugni al-Munaj.*
- h. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (Ii 'Usman ibn Yahya).*
- i. *Syamsuri li al-faraid.*
- j. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (Ii Sadaqah Dahlan.*
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin.*
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah.*
- m. *Fath al-wahab dan Syarahnya*²⁷

Dengan merekomendasikan kitab-kitab tersebut, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum relative berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercapai kesegaraman. Agar dapat mengatasi masalah maka muncul gagasan agar menyusun sebuah buku yang mencakup hukum yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian akan tercapai kesatuan dan kepastian hukum.²⁸

Pada periode ini dibentuk panitia kerjasama yang disebut PANKER MAHAGAM (panitia kerjasama Mahkamah Agung atau Departemen Agama) dalam rangka untuk mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah agar terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang

²⁷ Nur 'Aini Magfiroh, "Studi Analisis Ketetapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Lian", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongio Semarang, 2015), h. 38.

²⁸ Asriati "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", h.25.

ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk mrnghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Setelah adanya kerjasama dengan Mahkah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam sebagian masyarakat, menampilkan diri dalam rangka seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam.²⁹

3) Periode 1985 sampai sekarang

Peristiwa ini berlansung sejak ditandatanganinya surat Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan penyusunan Kompilasi Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 mei di Yogyakarta.³⁰ Isi surat keputusan tersebut merupakan penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam. Proyek tersebut berlangsung dan diberi jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek tersebut di dukung oleh keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya Rp. 230.000.000.00. biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.³¹

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bersama pada tanggal 12 Mei 1985 tersebut, maka telah ditentukan bahwa tugas proyek tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan hukum. Adapun sasarannya yakni mengkaji kitab-kitab yang digunakan dalam landasan putusan-putusan hakim agar dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional.

²⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h.6-7.

³⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h.9.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, h. 34.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a) Pengumpulan data

Pengumpulam data tersebut dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi hakim Peradilan Agama.

b) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan para ulama yang mempunyai keahlian dalam bidang Fiqh Islam.

c) Lokakarya.

Hasil pengkajian kitab-kitab serta wawancara tersebut perlu diseminarkan melauai lokakarya.

d) Studi Perbandingan.

Agar dapat memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu sama lain maka harus dengan jalan membandingkan hukum dari Negara-negara Islam lainnya.³²

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak mudah dijabarkan secara singkat. Bila diperhatikan Keputusan Bersama ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama pada tanggal 1 Maret 1985 No. 07/KMA 1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek tersebut diadakan, yakni:

³² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, h.15.

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya Peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, terkhusus di lingkungan peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama
- b. Guna mencapai maksud tersebut, dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.³³

Banyak dorongan dari berbagai pihak kepada pemerintah agar segera untuk mengesahkan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan tentang produk hukum yang akan mewadahi Kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun dalam merancang satu undang-undang akan memerlukan proses yang berlarut larut serta membutuhkan waktu yang sangat lama. Adapula keinginan agar menuangkan kepada Mukhtar Muhammad ke 42 di Yogyakarta berharap agar pemerintah segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam. Sehubungan dengan di undangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani intruksi Presiden Republik Indonesia, maka sejak itu pula secara formal berlaku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1991, menteri Agama mengeluarkan keputusan No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi Presiden RI. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam kemudian

³³ Hikmatullah "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*. 2017h, 45.

di sebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui surat edaran direktur pembinaan badan peradilan Agama Islam pada tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia.³⁴

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan latar belakang dan perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan usaha-usaha agar dapat keluar dari situasi dan kondisi internal yang pada saat itu masih diselimuti suasana kebekuan intelektual yang buruk. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam juga memcerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum Nasional, melepaskan diri dari teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha dalam pengembangan Pengadilan Agama.³⁵

Kompilasi hukum Islam telah berjalan tanpa adanya kendala yang berarti, yakni sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Namun pada awal tahun 2005 telah terjadi adanya pihak yang menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak dapat merespon semua bangsa Indonesia.³⁶

2. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku. Buku I: Tentang Perkawinan, Buku II: Tentang Kewarisan dan Buku III: Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar mengelompokkan bidang hukum perkawinan (*munakahat*), bidang hukum kewarisan (*fara'id*) dan bidang hukum

³⁴ Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2016. h, 67-68.

³⁵ Hikmatullah “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, h, 41.

³⁶ Hikmatullah “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, h, 44.

perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya, masing-masing buku terbagi terbagi dalam beberapa bab dan kemudian dalam bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang dirinci ke dalam pasal-pasal. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Tetapi porsi terbesar ada pada buku perkawinan. Kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan.³⁷

Hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan meliputi 170 pasal. Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, dilihat dari terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Buku II Hukum kewarisan, Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal mulai dari pasal 171-214. Buku III hukum perwakafan, Terdiri atas lima bab, meliputi 12 mulai dari pasal 215 sampai pasal 228.³⁸

3. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Peyusunan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan sebagai berikut:

- a. Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian

³⁷ Asriati "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", h.26.

³⁸ Asriati "Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia", h.27.

dirinci dan disistematiskan dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia.

- b. Landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim dalam memperhatikan kesadaran hukum masyarakat yakni UU No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
- c. Landasan fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Hal ini, landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sesuai dengan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni. Sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku, maka Kompilasi Hukum Islam dalam hukum materil dapat ditetapkan berdasarkan instruksi Presiden.³⁹

Intruksi Presiden tersebut ditujukan kepada menteri Agama agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang telah disepakati tersebut. Kemudian yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam ini yakni keputusan menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni Tahun 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia. Penetapan keputusan tersebut menyatakan bahwa:

³⁹ Hikmatullah “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, h, 48.

- a. Intruksi presiden Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada para menteri agar agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat.
- b. Menyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- c. Maka dengan itu, perlu dikeluarkan keputusan menteri agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan intruksi Presiden tersebut.⁴⁰

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh Negara hal ini berdasarkan dengan adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi hukum nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam dan menjadi rujukan pertama bagi Hakim agama agar dapat menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam.⁴¹



⁴⁰ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2010. h. 9.

⁴¹ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2010. h. 13.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM HANAFI
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERKAIT STATUS
PERNIKAHAN SETELAH TERJADI LIAN**

A. Pendapat Imam Hanafi Tentang Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian

Terjadinya lian disebabkan oleh dua hal. Pertama suami menuduh istrinya berzina tetapi ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang akan menguatkan tuduhannya itu. Hal demikian jika istri jelas melakukan zina, misalnya suami melihat dengan mata kepalanya sendiri sewaktu istrinya berzina atau dengan istri mengaku dan keterangannya dibenarkan. Dalam masalah ini, sebaiknya suami menceraikan istrinya tanpa melalui lian. Kedua, suami menolak isi kandungan istrinya. Semisal suami mengaku belum pernah bersetubuh dengan istrinya sejak akad nikah, atau bila istri sudah melahirkan sebelum lewat enam bulan sejak bercampur dengan suaminya.¹

Dalam hal ini imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menafikan kandungan, maka tidaklah dilakukan lian diantara keduanya dan tidak pula dihukum kandungan yang dikandung istrinya. Tetapi jika ia dengan terang menuduh istrinya berzina, hendaklah ia berlian lantaran tuduhannya tersebut, dan anak yang didalam kandungan istrinya tetap dinasabkan kepadanya baik dilahirkan dalam waktu enam bulan ataupun kurang dari enam bulan.²

Menurut imam Hanafi suatu perbuatan baru dikatakan lian apabila terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun dan syarat antara lain:

¹ T.p, *Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Kahar Masyhur (Cet I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.242.

² Tengku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Edisi II (Cet I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 286.

1. Syarat sahnya lian yaitu:

- a. Lian dilakukan didepan hakim.
- b. Suami istri yang hendak melakukan lian maka ia harus menunggu perintah dari hakim terlebih dahulu.
- c. Pernyataan lian genap sebanyak lima kali. Apabila ia mengurangi satu dari kelima pernyataan tersebut, maka lian hukumnya tidak sah.
- d. Masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan lian sesuai dengan formula yang diatur dalam lian.
- e. Tertib (berurutan), jadi apabila ia mendahulukan kata “laknat” dibanding keempat pernyataan kata lian tersebut, ataupun istri mendahului berlian dibandingkan suami maka lian tersebut dianggap tidak sah.
- f. Memberikan isyarat dari masing-masing pihak yang melakukan lian (jika ia hadir) dan menyebutkan nama dan nasabnya (jika ia tidak hadir)

2. Rukun lian sebagai berikut:

- a. Suami, tidak akan jatuh li'am apabila yang menuduh zina atau menginkari anak tersebut laki-laki lain yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Begitu pula dengan istri, tidak akan terjadi lian jika yang dituduh berzina itu bukan istrinya.
- b. Lafadz lian yang akan diucapkan yaitu lafadz yang menunjukkan tuduhan zina atau penginkaran kandunagan kepada istrinya.
- c. Kesaksian tersebut dikuatkan dengan sumpah.³

Beliau juga berpendapat bahwa jika suami tersebut tidak dapat menghadirkan saksi dan ia juga tidak mau mengucapkan lian maka beliau

³ Ziamul Umam “Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walosongo*, 2016. h. 62-63.

mengatakan, suami tersebut tidak wajib dijatuhi hukuman had, tetapi ia harus dipenjara sehingga ia mau mengucapkan lian atau dengan mencabut tuduhannya. Imam Hanafi beranggapan demikian karena mengacu kepada sabda Rasulullah Saw. yang di riwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'Anhu. mengatakan

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Membunuh suami karna tidak mau mengucapkan lian sesudah menuduh istrinya berzina adalah hukum yang bertentangan dengan kaidah ushul tersebut, oleh karenanya kebanyakan ahli fiqih tidak mewajibkan hukuman hadd dengan karna tidak mau mengucapkan lian, apalagi menghukum bunuh karena tidak mau bermula'anah. Sehubungan dengan perkara tersebut pendapat Imam Hanafi yang dianngap lebih tepat.⁵

Para ulama sepakat lian itu dilaksanakan dengan mendahulukan pihak suami, ia yang harus memberikan kesaksiannya lebih dulu. Asy Syafi'i dan lain-lain mewajibkan laki-laki yang melian lebih dahulu. Apabila perempuan mengucapkan lian lebih dahulu sebelum suaminya melian maka hal itu dikatakan tidak sah. Mereka beralasan bahwa lian itu disyari'atkan untuk menolak adanya

⁴ T.p, *Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Kahar Masyhur, h. 247.

⁵ Ziamul Umam "Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif", h. 65.

hukuman had yang dilontarkan oleh suaminya. Kalau lian didahului oleh pihak istri berarti ia menolak sesuatu yang belum ada.

Tetapi imam Hanafi berpendapat berbeda, ia menyatakan seandainya lian itu dimulai dari pihak istri maka tetap dianggap lian. Alasannya bahwa Allah Swt. telah menetapkan lian dalam Alquran dengan “wawu athaf” dan wawu tidak mengharuskan tertib atau urut, tetapi mutlak.⁶

Menurut Imam Malik dan Asy Syafi’i terjadi perpisahan antara keduanya setelah suami selesai mengucapkan lian dan mengatakan pula bahwa terjadi perpisahan antara keduanya sejak lian itu selesai diucapkan oleh suami dengan sempurna. Hal tersebut berbeda pula dengan pendapat imam Hanafi yang berpendapat bahwa perpisahan itu belum terjadi setelah adanya keputusan dari hakim.⁷

Jumhur ulama pun berpendapat bahwa diakibat yang ditimbulkan dari lian merupakan fasakh terhadap pernikahan yang menjadikan perpisahan dan pelarangan selamanya diantara keduanya. Mereka berpendapat bahwa fasakh karena lian ini mengakibatkan istri tidak berhak lagi menerima nafkah iddah dan tempat tinggal karena nafkah dan tempat tinggal hanya dapat diterima oleh wanita yang beriddah karena talak bukan karena fasakh. Tetapi Abu Hanifah berpendapat berbeda ia mengatakan bahwa akibat lian bagi pernikahan merupakan talak bain *shugra* yakni dapat kembali membangun rumah tangganya dengan jalan akad nikah baru. Beliau beralasan bahwa sebab perpisahan tersebut datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan datangnya dari pihak istri semua perceraian yang datangnya dari pihak suami itu dianggap talak dan bukan fasakh.⁸

⁶T.p, *Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Kahar Masyhur, h.246.

⁷Sa'id Thalib AL-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim (Cet III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 248.

⁸Sa'id Thalib AL-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, h. 249.

Imam Hanafi berpendapat bahwasanya perceraian yang diakibatkan lian merupakan talak bain *shugra* yakni keduanya dapat kembali membangun rumah tangganya dengan menggantinya dengan akad nikah baru. Ia berpendapat perpisahan tersebut menyerupakan perpisahan ini dengan talak karena diqiyaskan dengan laki-laki yang impoten.⁹

Dari pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa perpisahan akibat lian merupakan talak bain *shugra*, maka dapat disimpulkan bahwa status pernikahannya menurut imam Hanafi tersebut tidak haram selama-lamanya. Melainkan keduanya dapat kembali membangun rumah tangganya kembali dengan jalan akad nikah baru.

B. Pendapat Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian

Ada terdapat beberapa hal yang akan menyebabkan hubungan suami istri yang mulanya dihalalkan oleh Agama tidak dapat dilakukan. Namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syarak. Terhentinya hubungan perkawinan tersebut dalam hal ini terbagi dalam tiga bentuk:

1. Dalam hal ini suami tidak boleh menggauli istrinya di karenakan ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia hanya dapat meneruskan hubungan suami istri apabila suami membayar denda (kaffarah). Terhentinya hubungan tersebut dalam fiqh dinamakan dengan *zihar*.
2. Suami tidak dapat menggauli istrinya karena ia telah bersumpah agar tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar

⁹Ziamul Umam “Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif”, h. 66.

kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinannya tetap utuh. Peristiwa tersebut di sebut *ila'*.

3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah melakukan sumpah atas kebenaran dan tuduhan kepada istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses lian dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut lian.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara singkat mengenai Lian dalam pasal 126.

Lian terjadi karena suami menuduh isterinya telah berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungannya atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran anak tersebut.¹¹

Lian juga dijelaskan dalam 44 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan¹²

Adapun tata caralian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 27 sebagai berikut:

- a. Ia (suami) bersumpah empat kali dengan kata tuduhan berzina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 198.

¹¹T.p, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 37.

¹²Tp, *Kompilasi Hukum Islam* h. 37.

- b. Ia (istri) menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau mengingkaran tersebut benar.
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara maka tidak dianggap terjadi lian.

Proses pelaksanaan lian hanya sah apabila dilakukan dihadapan pengadilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Lian sendiri merupakan perintah hakim kepada suami yang telah menuduh istrinya berzina agar melakukan sumpah apabila istrinya tersebut tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka suami harus menyebutkan namanya, tetapi jika istri itu hadir maka harus ditunjuk dengan isyarat tangan.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami yang telah melian istrinya berakibat fasakh atau terjadi pengharaman selamanya terhadap pernikahan. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 125 yang menyebutkan “lian menyebabkan putusnya perkawinan suami istri untuk selamanya”.¹⁴ Seperti halnya juga yang disebutkan dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan dalam pasal 70 menegaskan bahwa “perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diliannya”.¹⁵

Dari pendapat diatas jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat lian terhadap pernikahan yakni fasakh yang membuat pernikahan antara suami istri itu terputus untuk selamanya.

¹³ Imi Hadrah Mingka, “Kajian Hukum Kedudukan Anak Lian Dalam Mendapatkan Hak-haknya Sebagai Anak”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019. h, 24.

¹⁴ T.p, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 37.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 295.

C. Analisis Pendapat Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam tentang Status pernikahan Setelah Sumpah Lian.

Imam Hanafi selaku pendiri Mazhab Hanafi berpendapat bahwa lian mengakibatkan pernikahan tersebut putus. Akan tetapi mereka masih dapat kembali membangun rumah tangganya dengan jalan akad nikah baru karna menurut beliau perpisahannya merupakan talak bain *shugra*. Beliau menyerupakan perpisahan ini dengan talak karna diqiyaskan dengan laiki-laki yang impoten.¹⁶ Menurut beliau perpisahan karena talak dan perpisahan karena impoten memiliki kesamaan, yakni sama-sama baru dapat terjadi sesudah ada keputusan dari hakim, dan juga perceraian tersebut datangnya dari pihak suami maka menurut beliau itu disebut dengan talak. Sebab perceraian yang datangnya dari pihak suami adalah talak bukan fasakh.¹⁷

Dilihat dari ketentuan qiyas baik dari segi rukun dan syaratnya, maka pendapat imam Hanafi dianggap lemah, sebab perceraian karena lemah zakar atau impoten yang disebutkan sebagai hukum asal, ternyata perceraian karena impoten tersebut tidak ada satu pun nash baik Alquran maupun Hadist yang menjelaskan sebagai alasan perceraian. Akan tetapi merupakan qiyas dari penyakit sopak, gila, dan lepra.¹⁸

Pendapat imam Hanafi tentang bolehnya suami istri melakukan pernikahannya kembali dengan akad nikah baru dari pemahaman hadist yang menyatakan tidak boleh berkumpul kembali (keharaman selamanya), menurut pandangan beliau hadist tersebut berlaku apabila suami istri itu masih saling

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan AhmadZaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 690.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan AhmadZaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, h. 690.

¹⁸ Afton Muzzaqi, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akibat Lian Bagii Pernikahan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015. h. 123.

melian. Jadi menurut imam Hanafi, jika salah satu dari mereka telah mengakui kesalahannya berarti itu bukan lian, sehingga menurut beliau hukum lian pun batal. Alasan beliau pun secara sepintas dapat dibenarkan bahkan sangat rasional. Akan tetapi jika dikaji kebanyakan jumbuh ulama serta dari segi hikmah diturunkannya syariat lian lebih condong kepada berpendapat pengharaman selamanya.¹⁹ Dari pendapat imam Hanafi yang menyatakan bahwa status pernikahan setelah terjadinya lian merupakan talak bain *shugra* yakni dapat kembali membangun rumah tangganya dengan jalan akad nikah baru penulis menganggap kurang tepat karena sedikit pengikutnya karena dianggap kurang rajih.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri menyatakan bahwa suami yang telah melian istrinya berakibat fasakh yakni pengharaman selamanya terhadap pernikahan. Hal tersebut diatur dalam pasal-pasal tertentu yakni:

1. Bab XI menjelaskan tentang batalnya perkawinan yang diatur dalam pasal 70 menegaskan bahwa: perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diliannya.
2. Dalam bab XVI menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam pasal 125 dikatakan bahwa: lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.
3. Dalam bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan, terletak dalam pasal 162 dijelaskan bahwa: bilamana lian terjadi maka pernikahan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.²⁰

¹⁹ Ziamul Umam "Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif", h. 80.

²⁰ Ziamul Umam "Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif", h. 97.

Hal yang mendasari pendapat Kompilasi Hukum Islam ialah terletak pada Hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Umar Muttafaqalaih.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنِينَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ²¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata; Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai hadist Al Mutalaa'inain (suami-isteri yang meli'an), maka ia pun menjawab; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada Al Mutalaa'inain (suami-isteri yang meli'an): "Hisab kalian berdua terserah pada Allah. Salah seorang dari kalian berdua musti ada yang berdusta, maka tidak ada lagi jalan bagimu (suami) untuk kembali kepada isteri." Laki-laki itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan hartaku?." Beliau bersabda: "Tidak ada harta lagi untukmu. Jika kamu telah memberi sesuatu, maka hal itu adalah mahar yang kamu gunakan untuk menghalalkan farjinya, namun jika kamu berdusta atasnya, maka hal itu tentu akan lebih jauh bagimu.". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadist diatas menjadi dasar dari pendapat Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa akibat lian menyebabkan pernikahan putus selamanya dengan memahami perkataan Rasulullah Saw. yakni “maka tidakada lagi jalan bagimu (suami) untuk kembali kepada (istri). Hadist diatas pun menjelaskan bahwa jika suami dalam lian suami tersebut berkata maka tetap ia tidak mendapatkan harta sebab itu merupakan mahar yang digunakan karena ia telah menggauli istrinya

²¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Cv. Asy-Syifa, t.th), h. 445.

secara halal. Tetapi jika suami tersebut berdusta maka ia bertambah jauh dari hartanya.

Dari beberapa pendapat diatas penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perpisahan yang diakibatkan oleh lian adalah haram selama-lamanya atau dengan kata lain status pernikahannya pun haram selamanya. Dalam artian kapanpun dan sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat lagi melakukan pernikahannya kembali. Penulis juga berpendapat bahwa apabila dikemudian hari suaminya terbukti berdusta kepada istrinya setelah lian itu sudah dilakukan maka menurut penulis ia tetap tidak dapat mengembalikan pernikahannya walaupun dengan akad baru karena dengan adanya peristiwa tersebut itu telah membuktikan bahwa suaminya tersebut tidak mencerminkan seorang yang suami yang baik karena telah menjalankan fitnah dengan menuduh istrinya telah berzina atau mengingkari anaknya sendiri. Hal demikian sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, apalagi dalam tuduhannya tersebut membawa nama Allah serta bersedia mendapat laknatnya.

Jika seorang suami tersebut berkata benar dalam tuduhannya maka ia tidak seharusnya ia mempertahankan seorang isteri yang telah berzina serta telah berhianat kepadanya. Menurut penulis dengan adanya pemisah bagi keduanya untuk selama-lamanya itu sudah merupakan efek jera dan agar dapat menjadi pelajaran bagi semuanya agar jangan sampai menodai kesucian dalam rumah tangga tersebut, agar di kemudian hari tidak menyesal.

Hal yang mendasari penulis tidak sependapat dengan pendapat imam Hanafi yakni jika suami istri tersebut melakukan lian, maka mereka telah bersumpah yang disitu membawa nama Allah, maka ketika pasangan tersebut melakukan pernikahan kembali seakan sumpah atas nama Allah hanya sebagai

gurauan, tidak sesuai dengan sikap sebagai seorang suami yang mengharuskan memberikan kebaikan pada seorang istri agar dapat tercipta kerukunan keluarga yang diharapkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلِلصَّالِحَاتِ قَنْتَرٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²²

Ayat diatas menunjukkan penjelasan bagaimana seharusnya sikap seorang suami istri didalam berumah tangga, karena tujuan utama dari seorang yang berumah tangga yakni mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar mawaddah dan rahmah saling mencintai dan penuh kasih sayang.

Disamping itu juga penulis beralasan bahwa apabila suami telah melakukan lian maka sama saja suami telah menyebarkan aib perzinahan istrinya serta membukanya di depan masyarakat umum dan memermalukannya. Akibatnya lahirlah kebencian dan permusuhan antara suami istri tersebut, maka tidaklah mungkin orang yang telah melakukan perbuatan seperti ini untuk dapat disatukan lagi dalam ikatan pernikahan. Maka untuk kemaslahatan dan keadilan

²²Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim,2013). h. 84.

penulis mendukung pendapat dari Kompilasi Hukum Islam yakni pernikahan tersebut harus dipisahkan untuk selama-lamanya.

Selain dari perbedaan pendapat diatas penulis disini juga menemukan adanya persamaan pendapat diantara imam Hanafi dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun letak persamaan pendapat antar Imam Hanafi dengan Kompilasi Hukum Islam menurut penulis sendiri yakni pada syarat-syarat terjadi lian serta persamaan pendapat yang terletak pada penetapan kalimat yang harus diucapkan oleh suami dan istri. Sebab tuduhan berzina itu bersumber dari dasar hukum surah An-nur ayat 6-9. Begitu juga dengan dilaksanakannya lian keduanya berpendapat, lian hanya sah apabila jika dilakukan dipengadilan.

Dari persamaan tersebut penulis setuju dari pendapat keduanya mengenai syarat-syarat terjadinya lian, sebab lian tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut dan penetapan kalimat yang diucapkannya pun harus sesuai dengan apa telah diatur karna hal tersebut juga bisa membuat lian batal apabila kalimat yang diucapkan tidak sesuai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lian berasal dari kata la'anaa. Secara harfiah lian berarti saling melaknat, sedangkan secara terminologi berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sedangkan dia tidak memiliki empat orang saksi kecuali hanya dirinya sendiri, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lian diartikan sebagai sumpah suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah berbohong, masing-masing mengucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapatkan laknat Allah jika berdusta.

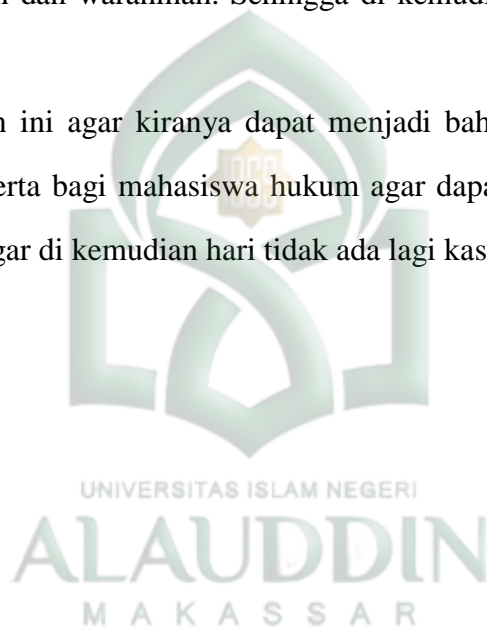
Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang seseorang yang melakukan lian, maka pernikahannya pun putus selama-lamanya hal ini tertuang dalam pasal 125 menyebutkan bahwa “lian menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya”. Hal yang mendasari pendapat Kompilasi Hukum Islam ialah terletak pada Hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Umar Muttafaqalaih yang artinya: “Bahwasanya Rasulullah Saw. berkata kepada dua orang yang saling melian: Allah yang akan menetapkan hukum diantara kamu, salah seorang diantara kalian adalah bohong dan tidak ada jalan untukmu kepadanya”. Berbeda pula pendapat imam Hanafi dalam menafsirkan lian tersebut, beliau yang menyatakan bahwa perpisahan akibat lian merupakan talak bain *sugra* dan memungkinkan untuk keduanya bisa bersama dengan syarat suami mencabut sumpah lian terhadap istrinya dan menggantinya dengan akad nikah baru.

B. Implikasi Penelitian

Lian timbul karena adanya tuduhan perzinahan yang dilontarkan suami kepada istrinya tetapi ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi untuk membenarkan perkataannya, maka dari itu ia harus membuktikan ucapannya tersebut dengan cara lian.

Sebelum terjadinya lian, alangkah baiknya jika didalam rumah tangga saling memegang janji setia terhadap pasangannya, hidup rukun dalam keluarga, agar dapat tercapai sakinah dan warahmah. Sehingga di kemudian hari tidak ada lagi terjadi lian.

Adapun penelitian ini agar kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti berikutnya, serta bagi mahasiswa hukum agar dapat memahami lian dan dapat jadi pelajaran agar di kemudian hari tidak ada lagi kasus lian yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- AbdulDjamali, *Hukum Islam* Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Aini Magfiroh Nur, “Studi Analisis Ketetapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Lian”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongio Semarang, 2015.
- Ahmad Khotibul Umam dan Abd Muan “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2016.
- Al-Hamdani Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husain Al Hamid, *Fiqh Muslimah Ibadah: Mu'amalat*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1995.
- Amalia Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asriati “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dikti*, 2012.
- As-Subki Yusuf Ali, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khosin Cet. II; Jakarta: Amzah, 2012.
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab* Cet III; Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Al-Yasin Muhammad Jasim Syekh *Fiqh al-Mar'ah in al-Mahdi ila al-Lahdi*, terj. Kaserun As. Rahman *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, Cet I; Jakarta: Pt Serambi Semesta, 2017.
- Asikin Zainal, Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, Dkk, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry Muammar, *Etika dan Praktik Bermazhab: Membangun Toleransi Antar Umat* Cet I; Gowa Alauddin University Press, 2013
- Chalil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* Cet X; Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI Cet I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Pt Bulan Bintang, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli A, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Dja'far M, Umay, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Cet I; Jakarta: Zakia Press, 2004.

SiregarSyahmediRamadhan“Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh”, *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, t.th.

Ghazaly RahmanAbdul,*Fiqh Munakahat*Jakarta: Kencana, 2008.

Hafidzi Anwar,”Penolakan Nasab Anak Lian dengan Ta’liq Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Dengan al-Mughni”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2018.

HidayatiArliyani “Akibat Hukum Perceraian Lian Terhadap Suami Istri”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2013.

Hikmatullah “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”,*Jurnal Ajudikasi*. 2017.

IlahiFadhel, *Zina Problematika dan Solusinya* Cet I; Jakarta: Qisthi Press: 2005.

IlyasNurudin, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*. (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000)..

Johanny Ibrahim, Junaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cet.II; Jakarta: Kencana, 2018.

Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Surabaya: Halim, 2013.

KhairunnisakZaisika,”Perceraian Lian dan Akibar Hukum Dalam Perspektif Fiqih”, *Premise Law Jurnal*, 2015.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta:Prenada Media Group, 2016.

Marahamid Najamuddin, Rahman Abdul Sakka, *Takbir Salat Id Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Krititk Hadistnya*, *Jurnal Al Azhar Islamic Law Review* Vol. 1 No. 2, 2019.

Mingka Imi Hadrah, “Kajian Hukum Kedudukan Anak Lian Dalam Mendapatkan Hak-haknya Sebagai Anak”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.

Musyahid Ahmad, *Falidasi Studi Orientalisme Terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Nazir M, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nasution Husein Amin, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet II; Jakarta: Rajawali Press, 2012.

RambeNawami,*Fiqh Islam* Jakarta: Duta Pahala:1994.

RacoJ.R, *Metode Peneltian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* Jakarta: Grasindo, 2010.

Said Fuad. A, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1994.

SabiqSayyid *Fiqhussunnah* ,terj. Mohammad Nabhan Husein,*Fikih Sunnah Jilid IX* Cet.XVI; Bandung: Pt. Alma’rif, t.th.

SabiqSayyid,*FikihussunnaJilidXII*, Cet XII; Bandung: PT Alma’rif, T.th.

Sarong Hamid,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.

- Gunawan, Edi “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2010.
- RahmanAbdur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressido, 1992.
- Ridwan Saleh Muhammad, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sohari, M.A Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: kecana, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* edisi Cet 1; Jakarta: Kencana, 2009.
- T.p. *Bulughul Maram*, Jilid II, Terj. Kahar Mansyur Cet I; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992.
- T.p, *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Undang-undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UmamZiamul, “Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanafi dengan Hukum Positif”, *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- Wahid Haddade Abdul, *Fiqh Realitas*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Widiana Wahyu “Aktualitas Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2002.
- Yanggo Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Yanggo Huzaimah Yanggo, *pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.